

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), hal.195
- Ampah Muslimin, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung; Alumni, 1980). Hal.74
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 77–78
- Bustami. *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*. (Jakarta; Erlangga. 2011).
- Juniarso Ridwan, Achmad sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Pubik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm.90.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung, 2024) hlm. 38.
- Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), Cet3, Hal.2
- N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2-3
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal.11
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet.16, (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal.29.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filasafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 133.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 206.

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h.19

Jurnal

Adellya Salsabilla H., “Penerapan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Instrumen Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol.2 No.3 (November 2022): 59, <https://doi.org/10.51903/education.v4i1>.

Alvian D. Irawan., “Gambaran Analisis Pembangunan Kesehatan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kesehatan Tambusui*, Bol.3 No.3, (September 2022), Hal.369.

Asri N. A., “Tantangan dan Isu Strategis Sumber Daya Kesehatan Manusia Kesehatan pada Puskesmas di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol.3 No.3 (September 2022), Hal. 364.

Atma Ras. Et.al., “Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Takalar,” *Journal Publicuho*, Vol.7 No.3, (Agustus-Oktober 2024): 1575-1576, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.518>.

Azmiati Z., dan Mhd. Asri Pulungan, “Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi manusia” *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol.1 No.1 (Juli 2020), hal.33

Chrystofel B., et. al., “Tugas dan Peranan Penting Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol.2 No.1 (Januari 2025). Hal.1424.

Edi Prayitno. “Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anastesi Di Rumah Sakit”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol.1 No.1 (Maret 2017); 74.

- Farida S. K., “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1 No.1, (Juni 2022), Hal.31
- Fheriyal sri isriawaty.”Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, Edisi 2, (2015); 1,
- Gunawan W., “Wewenang, Pelimpahan Kewenangan dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata,” *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol.9 No.2, (Juli 2023), Hal.312, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653>.
- Hutagaol R. R., “Tanggung Jawab Hukum dalam Pengawasan Tenaga Medis Tinjauan Kasus Dokter Gadungan Susanto,” *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.6 N0,1 (Januari 2025), Hal. 498
- Izzy A. L., & Danang W. M., “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital,” *Jurnal Sapientia et Virtus*. Vol.7 No.2 (2022), Hal. 87-88.
- Jihan Nabila, et.al., “Hubungan Motivasi Belajar Terhadap Kelulusan Computer Based Test Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, Vol.8 No.1, (Mei 2022), Hal.54-62.
- Maisara Sunge, “Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 6, No. 2, (Juni, 2009): 187.
- Mega O. D. S. B., & Triana, Y. “Kewajiban Surat Izin Praktik bagi Dokter dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol.5, No.1 (Maret 17, 2024); 798, <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.25365>

- Muchlisin, “Konsep Perizinan dalam Kaidah Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2 (Juli 2022), hal.123. Maisara Sunge, “Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 6, No. 2, (Juni, 2009): 187.
- Noorhaliza A. K., et. al., “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol.1 No.2, (Januari 2024), Hal.7
- Laksono, S., “Sumpah Hipokrates di Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol.3 No.1, (Maret 2023), Hal.2.
- Sadiidaa A. Z. A. N., Hudi Y., “Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No.29 Tahun 2004,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.1 No.9, (November 2024), Hal. 4993.
- Rawis Joulanda A. M., et.al., “Analisis Tingkat Kelulusan dan Lama Pendidikan Dokter,” *Jurnal Syntax Literate*, Vol.9 No.6, (Juni 2024), Hal.3265.
- Rinaldi S., H. Ardiansah, Bagio K., “Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter di Indonesia” *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.7 No.1 (Juli 2022), hal.68-69
- Rila Kusumaningsih, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan kesehatan mental,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No.1 (September 2023), hal.11
- Sadiidaa A. Z. A. N., Hudi Y., “Aspek Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Berdasarkan UU. 29 Tahun 2004,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.1 No.9 (November 2009), hal.4989.
- Sarkawi, “Kewenangan Daerah Otonom dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol.30 No.3 (Oktober 2017), hal.501,
- Sharon, Grace. “Teori Wewenang dalam Perizinan,” *Juenal Justiciabelen*, Vol.3 No.1 (Februari 2021): 50-63, <https://dx.doi.org/10.30587/jurticiabelen.v3i1.2249>

- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No.3, (2019), hal.549-550.
- Susetiyo, W., dan Ifitah, A., "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Supremasi*, Vol.11 No.2 (2021): 92-93, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.3 No.1 (April 2022), hal.91,
- Yussy A.M. "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Cita Hukum*, Vol.6 No.1, (2018); 165, <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>
- Zuhair N., & Yovita A. M. "Legalitas Dokter yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit", *Jurnal Penelitian*, Vol.8, No.1 (Juli 2024); 31, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4.4226

Peraturan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 2 ayat (1).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2052/menkes/per/x/2011

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan

Wawancara

Gregorius Yoga Panji Asmara, “Hasil Wawancara dengan Anggota Biro Hukum Pembinaan & Pembelaan IDI Kota Semarang”, Februari 18, 2025.

Internet

Averus Kautsar. “Menkes Jelaskan alasan Organisasi Profesi Tak Masuk UU Kesehatan Baru.” *DetikHealth*, 14 Juli 2023.

Bagir Manan, “ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945”, Makalah, Tidak Dipublikasikan, (1995), hal.8

Dina F. R., “Analisis Implementasi Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia dan Negara Lainnya,” (Depok, Universitas Indonesia, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/376584120>.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Landak. *Surat Izin Praktik (SIP) Dokter (Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi)*. Diakses pada 16 Maret 2025, dari <http://dpmptsptk.landakkab.go.id/izin/detail/surat-izin-praktik-sip-dokter-dokter-umum-dokter-spesialis--dan-dokter-gigi>.

Fery Oktafianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak Pada Industri Mebel di Kabupaten Jepara” (Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 51.

Fikri, Herowati P., Zainuri, “Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 Tahun 2023, (Desember 2023), hal. 400.

Malikah B., “Tantangan Sistem Kesehatan Nasional: Distribusi dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia,” (Depok, Universitas Indonesia, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/376521276>.

Marcus Lukman, “Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta dampaknya

terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, *Disertasi : Universitas Padjadjaran*, (1996), hal.189

Mohammad Rudiansyah, “Pentingnya Surat Ijin Praktik Bagi Dokter,” *Ulin News*, (Banjarmasin: Maret 2020)

Wildan, P. “Hilangnya Rekomendasi OP di UU Kesehatan Baru, Dinilai Berpotensi Munculkan Dokter Gadungan,” *Suara Surabaya*, September 14, 2023.

LAMPIRAN

A. Surat Jawaban Riset Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang

IKATAN DOKTER INDONESIA
CABANG KOTA SEMARANG
Jl. Sri Rejeki Utara IV/2 Semarang. Telp. 024 76469132
Email : idi_cabsemarang@yahoo.com, info@idisemarang.org
Web : idisemarang.org

DEMIKIAN PERTIMBANGAN:
Dr. Elang Tumbelaka
Dr. Eka Rini, Sp.B., Sp.BB
Dr. Henggo Riniyanto, MS, Sp. ORL, Sub-ORL
Dr. Spiko Widiyanto K, SHM, JHKKes
Dr. Spiko Henggo
Ratihet, Sp.B, Sp. BPT/OK, FRACS, FCS
DR. Dr. Mochammad Akbar Haldun, Sp. PD
KETUA
Dr. Sigit Kirana Lintang Bhima, Sp. FM(K), M.Sc
KETUA I
Dr. Samudra, M. Kes
KETUA II
DR. Dr. Rendi Sudhaningsih, M. Sc
KETUA III
DR. Dr. Mahadul Asam, M. Kes
SEKRETARIS
Dr. Prihatin Iman Nugroho, M. Kes, Sp. P
WAKIL SEKRETARIS
Dr. Samson, M. Sc Med, Sp. B
BENDAHARA
Dr. Lestija Rini Daryanti, M. Kes
WAKIL BENDAHARA
Dr. Syarifah Soreya
BIDANG ORGANISASI & REKOMENDASI SIP
Dr. Muhammad Ridwan
Dr. Andhiana Tjitra Widi WLS, Sp. THT-KL, MS, Med
Dr. Indryah
DR. Dr. Dwi Henggo Haldun, Sp. Res, Sp. ORL-SubORL
Dr. R. Vito Mahendra Ekaningsih, Sp. B, KBD, MS, Med
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Prof. Dr. Muhammad Theodor Arief, PhD, FM, Sp. BSB
Dr. Achmad Zulfia Juntarto
MS, Med, Sp. Jend, PHD, JHKKes
Dr. Fathur Nurkholidi, Sp. PD-KP
Dr. Melita Hendaningtyas, Sp. PH, MS, Med
DR. Dr. Hadi Sarosa, M. Kes
Dr. Avelina Dutha Pratama, Sp. P, FJDR
BIDANG KESEJAHTERAAN ANGGOTA & PENGABDIAN MASYARAKAT
Dr. Dodi Wipaksono
Dr. Itha Hugi Savitri
Dr. Dian Inayati, M. Kes
Dr. Sri Magarti
Dr. Muhammad Rivan Arizal
Dr. Dedi Winarto, Sp. PD
Dr. Fikri Maulana Deneo Putra
BIDANG HUMAS DAN RELASI
ANTAR LEMBAGA
Dr. Faiza Munabari, M. Kes
Dr. Diana Novitiani, Sp. P, J, K, EMD, FINASIM
Dr. Michael Christawati Arisatid
Dr. Lisa Suryani Dewi, Sp. PA, M. Sc Med
Dr. Nur Santi, Sp. P
Dr. Ivo Devi Kristyanti, Sp. B
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN SOSIAL MEDIA
Dr. Yanaer Iman Santosa, Sp. THT-KL, MS, Med
Dr. Niyata Hananta Karunawan
Dr. Ocky Prahalantiya, Sp. PK
Dr. Edward Tirtananda Wikanta
Dr. Sartika Warapari
Dr. Aulia Parvasani, MH
Dr. Ratna Hapsari
BIRO HUKUM PEMBINAAN & PEMBELAAN ANGGOTA (BHPZA)
DR. Dr. Darwito SH, Sp. B, Sp. KIOK
Dr. Tuntas Dhanardhono, MS, Med, MH, Sp. FM
Dr. Gregorius Yoga Panti Amara, SH, MH, CLA
Dr. Anief Tagaly Adhama
Dr. Ari Setiyawan, M. Kes, M. Sc Med, Sp. B
TIM PENGEMBANGAN & PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN (TIM-P2KB)
Dr. Ryan Halleyantoro, M. Biomed, Sp. Par. K
Dr. Amalia Nuggetiana Setiyawati, MS, Med, Sp. A
Dr. Cahyaningrum Branaad, MH
Dr. Prasasti Sri Utami, M. Biomed
Dr. Grangiang Imam Purwahadi
Dr. Iftah Indriani, MH
MIKES
Ketua
DR. Dr. Teuku Mirza Iskandar, Sp. OG, Subsp. ORL
Wakil Ketua
Dr. Akbar Kurniawan, M. Kes
Sekretaris
Dr. Hama Dwi Anggrahany, M. Kes
Ketua Divisi Kemahkamahahan
Dr. Anindyo Pradipta Suryo
DR. Dr. Wahyu Budi Martono, MS, Med, Sp. THT-KL
Ketua Divisi Pembinaan
DR. Dr. Muchlis A. U. Safo, Sp. PD-KPTI, FINASIM
Prof. DR. Dr. Dwi Pudjonarko, Sp. SKJ
Dr. Juron Respati Hudoyo, SH, MH, Kes
Ketua Divisi Advokasi
DR. Dr. R. Soerjo Hadjono, Sp. OG, Subsp. Obses
DR. Dr. Setya Trisnadi, Sp. FM, SH

No. : 22/IDI/Cab.KotaSmg/II/2025
Lamp. : -
Hal : **Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
di
Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan nomor surat 140/UN7.F1/AK/II/2025 tertanggal 07 Februari 2025 sesuai dengan pokok surat, maka dengan ini Pengurus IDI Cabang Kota Semarang menerangkan bahwa Mahasiswa bernama Haura Najla Atshila telah menyelesaikan penelitian di IDI Kota Semarang dengan judul "Urgensi Pemberian Surat Ijin Praktik Bagi Tenaga Medis Dalam Sistem Kesehatan Nasional".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Februari 2025

Ikatan Dokter Indonesia
Cabang Kota Semarang
Ketua

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA IDI CABANG KOTA SEMARANG

Dr. Sigit Kirana Lintang Bhima, Sp. FM(K), M.Sc
NPA IDI : 56.282

- scan validasi <https://validasi.idisemarang.org> -

**B. Dokumentasi Wawancara dengan Dr. dr. Gregorius Yoga Panji
Asmara, S.H., M.H., CLA. Selaku Anggota Biro Hukum Pembinaan &
Pembelaan IDI Kota Semarang**

